



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SITI INGANATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **476772**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.380.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/160 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.442 m2/250 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 1.900 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 849 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 94.000.000
5. Tanah Seluas 73 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 36.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 86.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI/GETZ MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 34.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.847.418
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.524.847.418
III. HUTANG	Rp.	284.505.045
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.240.342.373

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.